

LAPORAN KINERJA (LAKIN)  
KPP PRATAMA KARAWANG  
TAHUN 2024



**KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARAWANG**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani no. 17, Nagasari, Karawang Barat, Karawang  
Telp. (0267) 8407116 Fax. (0267) 402145

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor S-632/SJ.1/2016 tanggal 23 Desember 2016 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2016.

Laporan Kinerja KPP Pratama Karawang tahun 2024 memuat target, rencana kerja yang telah ditetapkan dan capaian kinerja selama periode tahun 2024. Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kaarawang Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kaarawang atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja dibuat sebagai salah satu bentuk pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) hasil analisa kinerja pada tahun 2024. Keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan selama tahun 2024 akan menjadi acuan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian LAKIN ini dibuat sebagai laporan pertanggungjawaban yang dapat menjelaskan secara transparan atas kinerja KPP Pratama Kaarawang yang berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2024.

Karawang ,31 Januari 2025  
Plt. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Karawang



Ditandatangani secara elektronik  
Sutan Andi Gunawan Srg



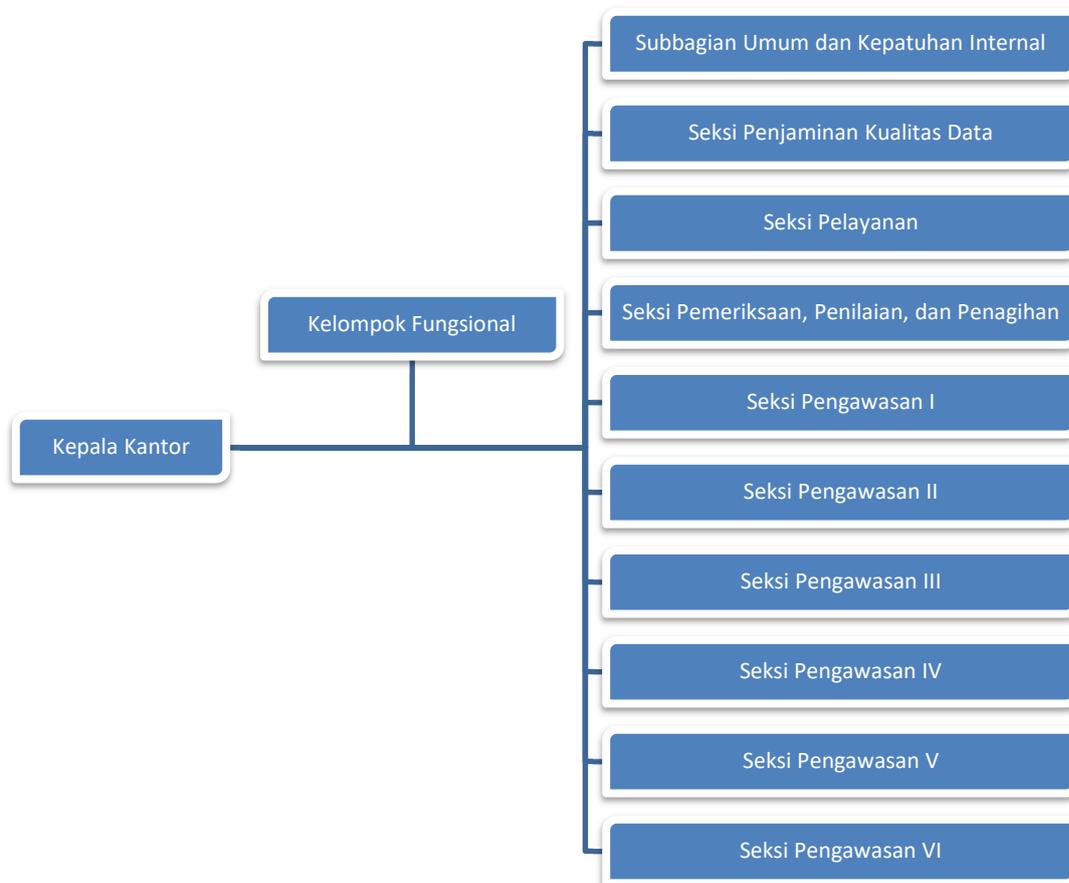
## BAB I PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karawang merupakan sebuah satuan kerja vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat II, Kementerian Keuangan. KPP Pratama Karawang Memiliki tujuan menghimpun penerimaan negara di sektor pajak yang meliputi Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Meterai.

Struktur Organisasi KPP Pratama Karawang adalah sebagai berikut :

Dengan diberlakukannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Struktur Organisasi KPP Pratama Karawang adalah sebagai berikut :

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian,



keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian internal, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak

lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

- c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
- e. Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI mempunyai tugas Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundangundangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan, dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Wilayah kerja KPP Pratama Karawang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Karawang provinsi Jawa Barat. Kabupaten Karawang terdiri dari 30 kecamatan dan 12 kelurahan 297 desa, yaitu sebagai berikut:

1. Kecamatan Banyusari (12 Desa/Kelurahan)
2. Kecamatan Batujaya (10 Desa/Kelurahan)
3. Kecamatan Ciampel (7 Desa/Kelurahan)
4. Kecamatan Cibuaya (11 Desa/Kelurahan)
5. Kecamatan Cikampek (10 Desa/Kelurahan)
6. Kecamatan Cilamaya Kulon (12 Desa/Kelurahan)
7. Kecamatan Cilamaya Wetan (12 Desa/Kelurahan)
8. Kecamatan Cilebar (10 Desa/Kelurahan)
9. Kecamatan Jatisari (14 Desa/Kelurahan)
10. Kecamatan Jayakarta (8 Desa/Kelurahan)
11. Kecamatan Karawang Barat (8 Desa/Kelurahan)
12. Kecamatan Karawang Timur (8 Desa/Kelurahan)
13. Kecamatan Klari (13 Desa/Kelurahan)
14. Kecamatan Kota Baru (9 Desa/Kelurahan)
15. Kecamatan Kutawaluya (12 Desa/Kelurahan)
16. Kecamatan Lemahabang (11 Desa/Kelurahan)
17. Kecamatan Majalaya (7 Desa/Kelurahan)
18. Kecamatan Pakisjaya (8 Desa/Kelurahan)
19. Kecamatan Pangkalan (8 Desa/Kelurahan)
20. Kecamatan Pedes (12 Desa/Kelurahan)
21. Kecamatan Purwasatu (8 Desa/Kelurahan)
22. Kecamatan Rawamerta (13 Desa/Kelurahan)
23. Kecamatan Rengasdengklok (9 Desa/Kelurahan)
24. Kecamatan Tegalwaru (9 Desa/Kelurahan)
25. Kecamatan Telagasari (14 Desa/Kelurahan)
26. Kecamatan Telukjambe Barat (10 Desa/Kelurahan)
27. Kecamatan Telukjambe Timur (9 Desa/Kelurahan)
28. Kecamatan Tempuran (14 Desa/Kelurahan)
29. Kecamatan Tirtajaya (11 Desa/Kelurahan)
30. Kecamatan Tirtamulya (10 Desa/Kelurahan)

Wilayah kerja KPP Pratama Karawang memiliki sejumlah daerah potensial dengan beberapa kategori, diantaranya adalah :

- Kawasan Industri, dimana terdapat Karawang International Industrial City (KIIC) yang merupakan salah satu kawasan industri terbesar;
- Kawasan properti dan *real estate*, diantaranya perumahan Galuh Mas, Grand Taruma, Resinda, Summarecon, dan Permata Bumi Kencana;
- Kawasan bisnis dan pusat perbelanjaan, diantaranya Jalan Tuparev, Niaga, Johar, Kertabumi, Mayofield Mall, Mall Karawang, dan Carrefour;
- Rumah sakit, diantaranya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang, Rumah Sakit Cito, Rumah Sakit Dewi Sri, dan Rumah Sakit Bayukarta; dan
- Bendaharawan-bendaharawan instansi pemerintah.

### Gambaran Sumber Daya Manusia KPP Pratama Karawang

Posisi	Jumlah	Persentase
Struktural	94	79,66%
Fungsional	24	20,34%
<b>Jumlah</b>	<b>118</b>	<b>100.00%</b>

Pangkat	Jumlah	Persentase
Pengatur Muda Tk. I / IIb	11	9,32%
Pengatur / IIc	7	5,93%
Pengatur Tk. I / IIId	16	13,56%
Penata Muda / IIIa	17	14,41%
Penata Muda Tk. I / IIIb	21	17,80%
Penata / IIIc	13	11,02%
Penata Tk. I / IIId	18	15,25%
Pembina / IVa	12	10,17%
Pembina Tk. I / IVb	1	0,85%
Pembina Utama Muda/IVc	2	1,69%
<b>Jumlah</b>	<b>118</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan Laporan Kinerja selama tahun 2024 ada target sasaran strategis yang tidak mencapai target yaitu Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Realisasi Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Karawang memperoleh indeks capaian kinerja sebesar 107,02% yang didapat dari dua belas Indikator Kinerja Utama yang terbagi dalam 4 Sasaran Strategis yaitu :

1. *Stakeholder Perspective* (30%)
2. *Customer perspective* (20%)
3. *Internal Process Perspective* (25%)
4. *Learning and Growth Perspective* (25%)

Adapun Nilai Kerja Organisasi KPP Pratama Karawang secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

NILAI KINERJA ORGANISASI								
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II								
KPP Pratama Karawang								
PERIODE PELAPORAN: S.D TRIWULAN IV 2024								
(sumber data : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor )								
Target IKU sampai dengan Akhir Tahun								
Kode SS/IK	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<b>Stakeholder Perspective</b>							<b>30,00%</b>	<b>102,79</b>
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,79
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,05%	Max	E/L	26%	57,78%	100,05
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	106,55	Max	P/L	19%	42,22%	106,55
<b>Customer Perspective</b>							<b>20,00%</b>	<b>100,26</b>
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							100,51
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,05%	Max	E/L	26%	57,78%	100,05
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	101,1%	Max	P/L	19%	42,22%	101,13
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		101,13%					100,01
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,01%	Max	E/M	21%	100,00%	100,01
<b>Internal Process Perspective</b>							<b>25,00%</b>	<b>108,62</b>
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,60
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107,19%	Max	E/M	21%	50,00%	107,19
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	108,88%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							115,64
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	119,67%	Max	P/M	14%	33,33%	119,67
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	107,24%	Max	P/M	14%	33,33%	107,24
7	Penegakan hukum yang efektif							73,88
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,94%	Max	P/M	14%	26,92%	119,94
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	85,36%	Max	P/L	19%	36,54%	113,81
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	0,00%	Max	P/L	19%	36,54%	0,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,0%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	84,00%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>							<b>25,00%</b>	<b>115,89</b>
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,78
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	117,41	Max	P/M	14%	33,33%	117,41
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,39	Max	P/M	14%	33,33%	109,87
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	97,26	Max	P/M	14%	33,33%	108,07
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>								<b>107,02</b>

## A. Rencana Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kementerian diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian/Lembaga yang disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra KL) untuk periode lima tahun. Sebagai tindak lanjut undang-undang tersebut, Kementerian Keuangan telah menyusun Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/KMK.01/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang berisi :

1. Profil organisasi Kementerian Keuangan
2. Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Srategis Kementerian Keuangan
3. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan
4. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kementerian Keuangan

Dalam Renstra Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 ditetapkan Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas, Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Sebagai pengelola APBN, setiap kebijakan fiskal yang diambil Kementerian Keuangan melalui alokasi pendapatan dan belanja pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa

dapat terwujud. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi, permasalahan, dan tantangan, memperhatikan misi pemerintah 2020-2024, visi dan misi Kementerian Keuangan 2020-2024, serta dalam rangka mendukung Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), maka visi dari Direktorat Jenderal Pajak “Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan” dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan. Adapun Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah mendukung Misi Kementerian Keuangan untuk “Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi”, dengan:

Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;

1. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
2. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024; Sejalan dengan tujuan kementerian keuangan 2020-2024 , untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 – 2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Direktorat Jenderal Pajak kemudian menetapkan Rencana Strategis dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, yang merupakan dokumen perencanaan yang berisi:

1. Profil Direktorat Jenderal Pajak
2. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak
3. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak
4. *Destination Statement* Direktorat Jenderal Pajak
5. Sasaran Strategis dan Program Direktorat Jenderal Pajak
6. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Pajak

Rencana Strategis ini disusun sebagai acuan untuk periode lima tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

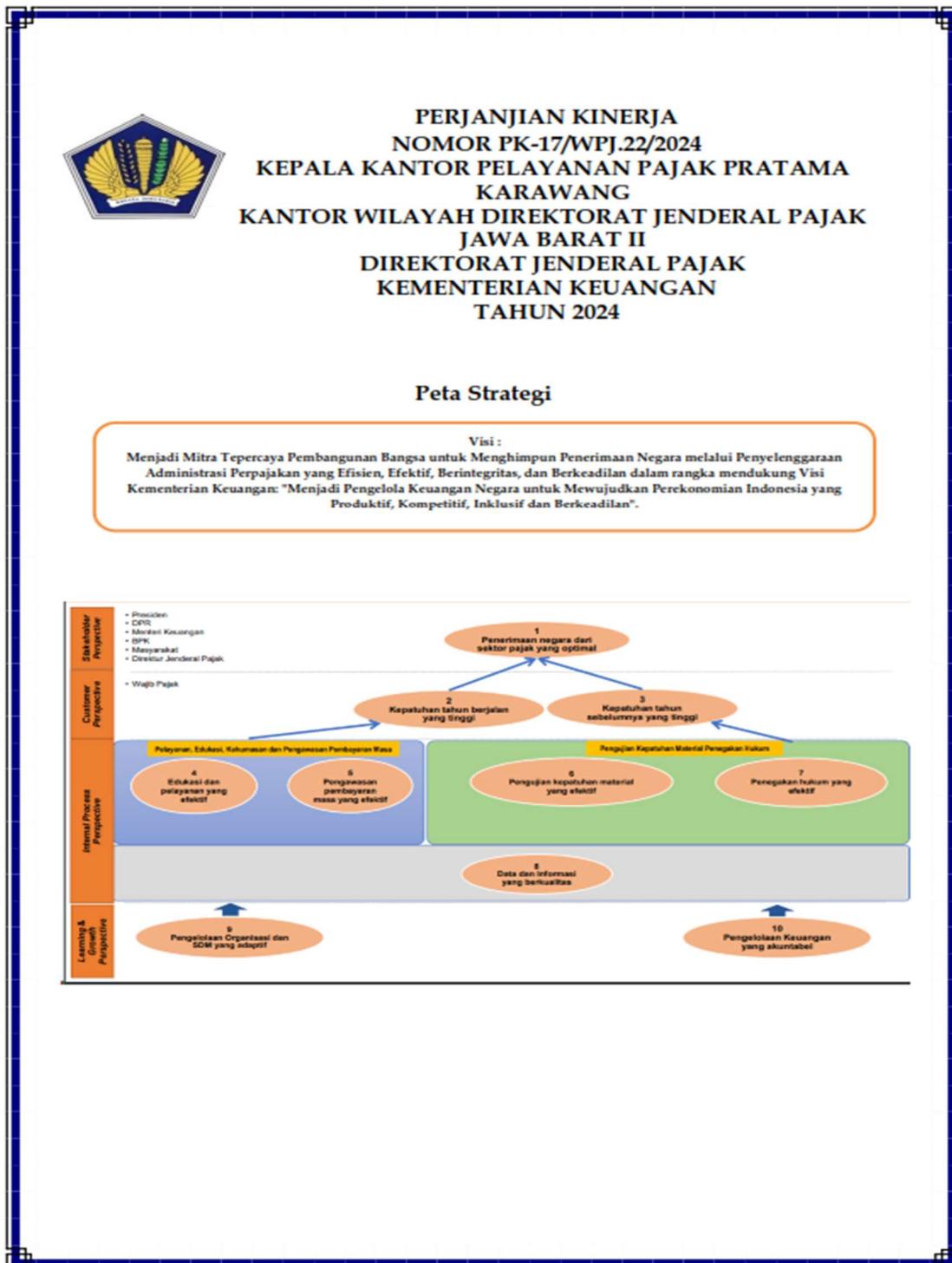
Menindaklanjuti diktum Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Berdasarkan Rencana Strategis tersebut, Sasaran Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak negara yang optimal
2. Kepatuhan wajib pajak yang tinggi
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif
5. Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif
6. Pengawasan Kepatuhan Material yang efektif
7. Penegakan hukum yang efektif
8. Data dan Informasi yang berkualitas
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

## **B. Penetapan Kinerja**

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Sasaran Strategis tersebut di atas kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang tahun 2024 tertuang dalam Perjanjian Kinerja Nomor PK-17/WPJ.22/2024 tanggal 31 Januari 2024 sebagaimana diagram berikut :



Dalam Perjanjian Kinerja, juga dituangkan Indikator Kinerja Utama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang tahun 2024, sebagaimana tabel berikut :

<b>PERJANJIAN KINERJA                      KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARAWANG                      KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT II                      DIREKTORAT JENDERAL PAJAK                      KEMENTERIAN KEUANGAN                      TAHUN 2024</b>			
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

**Program/ Kegiatan Tahun 2024**

**Anggaran**

<b>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</b>	Rp 1.254.914.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 523.575.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 210.614.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 520.725.000
<b>B. Program Dukungan Manajemen</b>	Rp 5.455.360.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 4.394.275.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1.061.085.000

Karawang, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Harry Gumelar



Ditandatangani Secara Elektronik  
Udianto

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Madya Bekasi adalah sebesar 107,02 dengan capaian masing-masing perspektif sebagai berikut :

Perspective	Bobot	Indeks Capaian
Stakeholder	30%	102,79
Costumer	20%	100,26
Internal Process	25%	108,62
Learning & Growth	25%	115,89

**Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Tahun 2024**

NILAI KINERJA ORGANISASI KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II KPP Pratama Karawang PERIODE PELAPORAN: S.D TRIWULAN IV 2024 (sumber data : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor ) Target IKU sampai dengan Akhir Tahun								
Kode SS/IK	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<b>Stakeholder Perspective</b>							30,00%	102,79
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,79
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,05%	Max	E/L	26%	57,78%	100,05
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	106,55	Max	P/L	19%	42,22%	106,55
<b>Customer Perspective</b>							20,00%	100,26
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							100,51
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,05%	Max	E/L	26%	57,78%	100,05
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	101,1%	Max	P/L	19%	42,22%	101,13
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		101,13%					100,01
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,01%	Max	E/M	21%	100,00%	100,01
<b>Internal Process Perspective</b>							25,00%	108,62
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,60
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107,19%	Max	E/M	21%	50,00%	107,19
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	108,88%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							115,64
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	119,67%	Max	P/M	14%	33,33%	119,67
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	107,24%	Max	P/M	14%	33,33%	107,24
7	Penegakan hukum yang efektif							73,88
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,94%	Max	P/M	14%	26,92%	119,94
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	85,36%	Max	P/L	19%	36,54%	113,81
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	0,00%	Max	P/L	19%	36,54%	0,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,0%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	84,00%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>							25,00%	115,89
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,78
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	117,41	Max	P/M	14%	33,33%	117,41
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,39	Max	P/M	14%	33,33%	109,87
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	97,26	Max	P/M	14%	33,33%	108,07
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>								107,02

## Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Analisis atas capaian kinerja disajikan sebagai berikut:

### IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	26,47%	45,57%	45,57%	68,59%	68,59%	100,00%	100,00%
Realisasi	24,55%	52,70%	52,70%	70,19%	70,19%	100,05%	100,05%
Capaian	92,75%	115,64%	115,64%	102,33%	102,33%	100,05%	100,05%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP. Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun sampai dengan pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah sampai dengan akhir tahun diadministrasikan di KPP baru

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- **Realisasi IKU**

Kinerja penerimaan KPP Pratama Karawang sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 telah mencapai 100,05% dari target sebesar Rp 4.772.894.680.000

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	79,92%	99,16%	144,59%	104,60%	100,05%

Indeks capaian persentase realisasi penerimaan pajak pada Triwulan IV tahun 2024 mencapai 100,05 dari target trajectory Triwulan IV sebesar 100 % terealisasi sebesar 100,05%, dengan nominal target selama setahun sebesar Rp. 4.772, 89 M terealisasi sebesar Rp. 4.775,36M

Upaya yang sudah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja :

1. Melakukan pengawasan pembayaran masa secara rutin dan penelitian terhadap SPT yang telah disampaikan
2. Pengawasan terhadap WP badan dan OP Non Karyawan yang belum pernah melakukan pembayaran
3. Pengawasan terhadap WP badan dan OP Non Karyawan tidak lapor/terdapat data
4. Menerbitkan STP bagi yang tidak/terlambat bayar maupun lapor
5. Melakukan kunjungan ke WP
6. Pengawasan terhadap PKP yang masih dirasa cukup banyak yang tidak / belum membayar PPN
7. Melakukan kegiatan penyuluhan dan sosial kepada WP guna meningkatkan kesadaran WP

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100%	100,05%

#### 4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Melakukan pengawasan pembayaran masa secara rutin dan penelitian terhadap SPT yang telah disampaikan</li> <li>✓ Pengawasan terhadap WP badan dan OP Non Karyawan yang belum pernah melakukan pembayaran</li> <li>✓ Pengawasan terhadap WP badan dan OP Non Karyawan tidak lapor/terdapat data</li> <li>✓ Menerbitkan STP bagi yang tidak/terlambat bayar maupun lapor</li> <li>✓ Melakukan kunjungan ke WP</li> <li>✓ Pengawasan terhadap PKP yang masih dirasa cukup banyak yang tidak / belum membayar PPN</li> <li>✓ Melakukan kegiatan penyuluhan dan sosial kepada WP guna meningkatkan kesadaran WP</li> </ul>	2025

### **IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**

#### **1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	106,55	106,40	106,40	107,48	107,48	106,55	106,55
Capaian	106,55%	106,40%	106,40%	107,48%	107,48%	106,55%	106,55%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- (1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- (2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
  - b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas  
Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas  
Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

#### Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan

2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq 8\%$ .

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =

$$(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$$

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	79,92%	96,27%	90,70%	120,00%	106,55%

untuk capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas mencapai 106,55 dengan target sebesar 100 terealisasi 106,55.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	79,92%	99,16%	144,59%	104,60%	100,05%

Indeks capaian persentase realisasi penerimaan pajak pada Triwulan IV tahun 2024 mencapai 100,05 dari target trajectory Triwulan IV sebesar 100 % terealisasi sebesar 100,05%, dengan nominal target selama setahun sebesar Rp. 4.772, 89 M terealisasi sebesar Rp. 4.775,36M

Upaya yang sudah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja :

8. Melakukan pengawasan pembayaran masa secara rutin dan penelitian terhadap SPT yang telah disampaikan
9. Pengawasan terhadap WP badan dan OP Non Karyawan yang belum pernah melakukan pembayaran
10. Pengawasan terhadap WP badan dan OP Non Karyawan tidak lapor/terdapat data
11. Menerbitkan STP bagi yang tidak/terlambat bayar maupun lapor
12. Melakukan kunjungan ke WP
13. Pengawasan terhadap PKP yang masih dirasa cukup banyak yang tidak / belum membayar PPN
14. Melakukan kegiatan penyuluhan dan sosial kepada WP guna meningkatkan kesadaran WP

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	100%	100%	106,55%

**4. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Melakukan pengawasan pembayaran masa secara rutin dan penelitian terhadap SPT yang telah disampaikan</li> <li>✓ Pengawasan terhadap WP badan dan OP Non Karyawan yang belum pernah melakukan pembayaran</li> <li>✓ Pengawasan terhadap WP badan dan OP Non Karyawan tidak lapor/terdapat data</li> <li>✓ Menerbitkan STP bagi yang tidak/terlambat bayar maupun lapor</li> <li>✓ Melakukan kunjungan ke WP</li> <li>✓ Pengawasan terhadap PKP yang masih dirasa cukup banyak yang tidak / belum membayar PPN</li> <li>✓ Melakukan kegiatan penyuluhan dan sosial kepada WP guna meningkatkan kesadaran WP</li> </ul>	2025

**IKU 02a-cp Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	26,47%	45,57%	45,57%	68,59%	68,59%	100,00%	100,00%
Realisasi	25,12%	54,34%	54,34%	72,43%	72,43%	100,05%	100,05%
Capaian	94,90%	119,25%	119,25%	105,59%	105,59%	100,05%	100,05%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Penguji Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- **Realisasi IKU**

Target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2023 adalah sebesar Rp. 4,672 T dan sudah terealisasi sebesar Rp. 4,674 T .Dengan target trajectory 100% sampai dengan akhir Triwulan IV 2024 KPP Pratama Karawang sudah mencapai 100,05 % dari total target setahun, sehingga indeks pencapaian dari PPM adalah 100,05.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	79,92%	99,16%	144,59%	104,60%	100,05%

### Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja

Untuk mencapai target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan akhir tahun bisa terealisasi, seksi terkait yang menjadi pengampu IKU pencapaian kegiatan PPM sudah melaksanakan beberapa langkah strategis di Triwulan IV yaitu :

1. Pengawasan terhadap WP badan dan OP Non Karyawan yang belum pernah melakukan pembayaran
2. AR agar melaksanakan update data profil pada aplikasi approweb dan SIDJP (dilakukan secara berkala)
3. Menerbitkan STP bagi yang tidak/terlambat bayar maupun lapor
4. Mapping Wajib Pajak potensial yang belum ada pembayaran pajak (dilakukan secara berkala)
5. Menerbitkan Surat Teguran terhadap WP yang belum melaporkan SPT Masa (dilakukan secara berkala)
6. Menerbitkan STP terhadap WP yang terlambat/ tidak Setor dan/ atau terlambat / tidak lapor SPT
7. Menerbitkan surat Imbauan dinamisasi PPh Pasal 25 tahun berjalan
8. Inventarisasi perusahaan baru di Kawasan industri

### 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100%	100,05%

### 4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ AR agar melaksanakan update data profil pada aplikasi approweb dan SIDJP (dilakukan secara berkala)</li> <li>✓ Mapping Wajib Pajak potensial yang belum ada pembayaran pajak (dilakukan secara berkala)</li> <li>✓ Mapping Wajib Pajak yang mengalami pertumbuhan pasca (Industri pengolahan dan perdagangan)</li> <li>✓ Menerbitkan Surat Teguran terhadap WP yang belum melaporkan SPT Masa (dilakukan secara berkala)</li> </ul>	2025

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Menerbitkan STP terhadap WP yang terlambat/ tidak Setor dan/ atau terlambat / tidak lapor SPT</li> <li>✓ Mapping Wajib Pajak Cabang/ WP besar lainnya terkait pemenuhan kewajiban dari Bonus</li> <li>✓ Menerbitkan surat Imbauan dinamisasi PPh Pasal 25 tahun berjalan</li> <li>✓ Pemanfaatan tindaklanjut data yang tersedia dari pihak ketiga untuk penggalan potensi</li> </ul>	
---	--

**02a-cp Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	79,7%	87%	87%	95,09%	95,09%	101,1%	101,1%
Capaian	120,00%	109,18%	109,18%	105,66%	105,66%	101,13%	101,13%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu; SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- a. SPT 1771 dan SPT 1771S yang dilaporkan oleh Badan;
- b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut; Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Dari target trajectory Triwulan IV 2024 sebesar 100% terealisasi 101,13% dengan indeks capaian sebesar 101,13. Adapun jumlah SPT Tahunan yang sudah masuk sampai dengan Triwulan Total Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi terdaftar Wajib SPT Tahunan yang menjadi target di tahun 2024 sebesar 117.458 SPT Tahunan dengan total SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sebesar 110.610 SPT Wajib Pajak dengan indeks capaian IKU sebesar 101,13.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	96,71%	100,09%	104,10%	101,69%	101,13%

### Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja :

Untuk mencapai target IKU ini , seksi terkait yang menjadi pengampu IKU sudah melaksanakan beberapa langkah strategis yaitu :

- ✓ Memberikan edukasi terkait pelaporan SPT Tahunan
- ✓ Membuat kelas pajak untuk SPT Tahunan
- ✓ Bersinergi dengan AR untuk membuat kegiatan penyuluhan
- ✓ Melibatkan relawan pajak dalam bimbingan pengisian SPT
- ✓ Melakukan WA Blast terhadap Wajib Pajak yang belum lapor SPT Tahunan

- Menyampaikan Surat Teguran Pelaporan SPT Tahunan
- ✓ Melakukan pemanggilan terhadap WP badan strategis yang belum menyampaikan SPT Tahunan dan dilakukan pembahasan mengenai masalah yang dihadapi WP

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%	100%	100,05%

**4. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memberikan edukasi terkait pelaporan SPT Tahunan</li> <li>✓ Membuat kelas pajak untuk SPT Tahunan</li> <li>✓ Bersinergi dengan AR untuk membuat kegiatan penyuluhan</li> <li>✓ Melibatkan relawan pajak dalam bimbingan pengisian SPT</li> <li>✓ Penyebaran informasi terkait kewajiban penyampaian SPT melalui kanal media sosial, spanduk,</li> <li>✓ Menyampaikan Surat Teguran Pelaporan SPT Tahunan</li> <li>✓ Melakukan pemanggilan terhadap WP badan strategis yang belum menyampaikan SPT Tahunan dan dilakukan pembahasan mengenai masalah yang dihadapi WP</li> <li>✓ Menerbitkan STP terhadap WP yang telah diberikan Surat Teguran SPT Tahunan</li> </ul>	2025

**03a-cp IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75,00%	75%	100,00%	100,00%
Realisasi	12,77%	19,37%	19,37%	25,96%	25,96%	100,01%	100,01%
Capaian	51,08%	38,74%	38,74%	34,61%	34,61%	100,01%	100,01%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

- **Realisasi IKU**

IKU ini sampai dengan akhir tahun sudah mencapai target. realisasi PKM KPP Pratama Karawang 2024 sebesar RP. 100,65 M. dengan realisasi Rp. 100,66 M atau sebesar 100,01% dari target 2024.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	90,65%	186,69%	47,58%	100,01%

### Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja

- ✓ Penggalian potensi melalui DPP
- ✓ Melakukan Bedah WP untuk meningkatkan penggalian potensi
- ✓ Pemanfaatan tindak lanjut data yang tersedia dari pihak ketiga untuk penggalian potensi
- ✓ IHT Forum AR untuk meningkatkan pemahaman dan sinergi AR dalam penggalian potensi (dilakukan 1 kali dalam sebulan)
- ✓ Pembuatan time schedule penyelesaian pemeriksaan
- ✓ Rapat Monitoring evaluasi dan tindakan Penagihan dan pemeriksaan

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100%	100,01%

**4. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penggalian potensi melalui DPP</li> <li>✓ Melakukan Bedah WP untuk meningkatkan penggalian potensi</li> <li>✓ Pemanfaatan tindaklanjut data yang tersedia dari pihak ketiga untuk penggalian potensi</li> <li>✓ IHT Forum AR untuk meningkatkan pemahaman dan sinergi AR dalam penggalian potensi (dilakukan 1 kali dalam sebulan)</li> <li>✓ Pembuatan time schedule penyelesaian pemeriksaan</li> <li>✓ Rapat Monitoring evaluasi dan tindakan Penagihan dan pemeriksaan</li> <li>✓ Memperbanyak tindakan penagihan (blokir)</li> <li>✓ Menindaklanjuti Data Dukung Revenue Management (DDRM) untuk menambah potensi PKM melalui WRA</li> </ul>	2025

**4a-cp IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40,00%	40,00%	60%	60%	74,00%	70,00%
Realisasi	17,13%	85,19%	85,19%	87,90%	87,90%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

**• Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku

- **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

#### Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
  - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
  - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

## 2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- **Formula IKU**

$$IKU EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laporan}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Indeks Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 107,19% dari target sebesar 100% dengan indeks capaian sebesar 107,19.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	80,40%	49,82%	78,89%	84,00%	88,80%

### Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja

- ✓ Melakukan mitigasi risiko terhadap penyelesaian pekerjaan khususnya Penyelesaian Administrasi Perpajakan
- ✓ Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan asosiasi /dinas/pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	74%	74%	74%	88,80%

#### 4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Melaksanakan kunjungan langsung ke tempat Wajib Pajak tertentu terutama untuk Wajib Pajak yang masuk dalam DSPT sehingga dapat menambah rasio perubahan perilaku lapor</li> <li>✓ Melakukan mitigasi risiko terhadap penyelesaian pekerjaan khususnya Penyelesaian Administrasi Perpajakan</li> <li>✓ Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan asosiasi /dinas/pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan</li> <li>✓ Aktif dalam kegiatan pembinaan UMKM</li> <li>✓ Bekerja sama dengan Pemda Karawang di Mal Pelayanan Publik</li> <li>✓ Melakukan Edukasi dan Penyuluhan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak DSPP kolaboratif dan mandiri</li> </ul>	2025

#### 4b-N IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

##### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	5%	10%	10%	15%	85,00%	100,00%
Realisasi	6%	13%	13%	18%	18%	107,19%	107,19%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	107,19%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal

Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei
---------------------

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Indeks Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 107,19% dari target sebesar 100% dengan indeks capaian sebesar 107,19.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	82,04%	81,88	88,67	81,53	107,19

**Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja**

- ✓ Melakukan mitigasi risiko terhadap penyelesaian pekerjaan khususnya Penyelesaian Administrasi Perpajakan
- ✓ Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan asosiasi /dinas/pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100%	107,19%

**4. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Melaksanakan kegiatan sosialisasi daring maupun luring, one on one dan one to many</li> <li>✓ Meningkatkan/memperbaiki layanan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak</li> <li>✓ Melaksanakan kegiatan penyuluhan baik luring maupun daring dengan baik sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan</li> <li>✓ Melaksanakan kegiatan IHT materi pelayanan</li> <li>✓ Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan asosiasi, komunitas, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya terkait peningkatan kepatuhan Wajib Pajak OPNK</li> </ul>	2025

**5a-cp IKU Persentase pengawasan pembayaran masa**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90,00%	90%	90,00%	90,00%
Realisasi	120,00	111,29%	111,29%	103,17%	103,17%	108,88%	108,88%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	114,63%	114,63%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

- **Formula IKU**

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	$\frac{(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})}{100\%}$
---	---	--

- **Realisasi IKU**

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa Triwulan IV 2024 tercapai sebesar 108,88% dari target sebesar 90%. Dengan demikian indeks capaian IKU sebesar 120.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	94,50%	102,93%	114,95%	108,88%

### Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja

- ✓ Mengingatkan Wajib Pajak melalui WA/SMS Blast untuk melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Masa secara tepat waktu.
- ✓ Melakukan Penelitian dalam rangka pencabutan PKP secara jabatan sesuai ND Pelayanan
- ✓ Menerbitkan STP atas Wajib Pajak yang tidak lapor dan terlambat melakukan pelaporan/pembayaran masa.
- ✓ Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan (data matching).
- ✓ Menerbitkan Surat Teguran atas SPT Tahunan/Masa
- ✓ Penelitian Penurunan Pembayaran PPH Pasal 21/PPN/PPH Pasal 25
- ✓ Menindaklanjuti Data IMB
- ✓ Melakukan sosialisasi kepada instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lain (ILAP)
- ✓ Optimalisasi dan peningkatan kegiatan pengawasan kepada Wajib Pajak terkait pemungutan/pemotongan pajak

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	108,88%

**4. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mengingatkan Wajib Pajak melalui WA/SMS Blast untuk melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Masa secara tepat waktu.</li> <li>✓ Melakukan Penelitian dalam rangka pencabutan PKP secara jabatan sesuai ND Pelayanan</li> <li>✓ Menerbitkan STP atas Wajib Pajak yang tidak lapor dan terlambat melakukan pelaporan/pembayaran masa.</li> <li>✓ Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan (data matching).</li> <li>✓ Menerbitkan Surat Teguran atas SPT Tahunan/Masa</li> <li>✓ Penelitian Penurunan Pembayaran PPH Pasal 21/PPN/PPH Pasal 25</li> <li>✓ Menindaklanjuti Data IMB</li> <li>✓ Melakukan sosialisasi kepada instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lain (ILAP)</li> <li>✓ Optimalisasi dan peningkatan kegiatan pengawasan kepada Wajib Pajak terkait pemungutan/pemotongan pajak</li> </ul>	2025

**6a-cp Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
Realisasi	N/A	113,88%	113,88%	116,86%	116,86%	119,67%	119,67%
Capaian	N/A	113,88%	113,88%	116,86%	116,86%	119,67%	119,67%

**• Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%)

- **Formula IKU**

$$\begin{array}{l} \text{Persentase penyelesaian} \\ \text{permintaan penjelasan atas data} \\ \text{dan/atau keterangan} \end{array} = \begin{array}{l} (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak} \\ \text{Strategis}) \\ + \\ (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak} \\ \text{Lainnya (Berbasis Kewilayahan)}) \end{array}$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU ini Sampai dengan Triwulan IV sebesar 119,67% dari target sebesar 100% dengan indek capaian 119,67

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	95,38%	113,86%	109,00%	118,07%	119,67%

### Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja

- ✓ Penggalian potensi melalui DPP dilakukan secara optimal (penelitian potensi WP melalui data yang tersedia dan analisa mandiri)
- ✓ Penerbitan LHP2DK dalam pengawasan memperhatikan nilai minimal realisasi dan jangka waktu penyelesaian
- ✓ Percepatan penyelesaian SP2DK untuk Tahun Pajak yang mendekati daluwarsa
- ✓ Fokus penyelesaian SP2DK DPP dan outstanding Kanwil (agar dapat diselesaikan tepat waktu)

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan	100%	100%	100%	119,67%

atas data dan/atau keterangan				
-------------------------------	--	--	--	--

#### 4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penggalian potensi melalui DPP dilakukan secara optimal (penelitian potensi WP melalui data yang tersedia dan analisa mandiri)</li> <li>✓ Penerbitan LHP2DK dalam pengawasan memperhatikan nilai minimal realisasi dan jangka waktu penyelesaian</li> <li>✓ Percepatan penyelesaian SP2DK untuk Tahun Pajak yang mendekati daluwarsa</li> <li>✓ Fokus penyelesaian SP2DK DPP dan outstanding Kanwil (agar dapat diselesaikan tepat waktu)</li> </ul>	2025

### 6b-N IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
Realisasi	118,00	115,06%	115,06%	119%	119%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	115,06%	115,06%	118,93%	118,93%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan

ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis)
		+
		(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

- **Realisasi IKU**

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa Triwulan IV 2024 tercapai sebesar 108,88% dari target sebesar 90%. Dengan demikian indeks capaian IKU sebesar 120.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	94,50%	102,93%	114,95%	108,88%

**Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja**

- ✓ Mengingatkan Wajib Pajak melalui WA/SMS Blast untuk melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Masa secara tepat waktu.
- ✓ Melakukan Penelitian dalam rangka pencabutan PKP secara jabatan sesuai ND Pelayanan
- ✓ Menerbitkan STP atas Wajib Pajak yang tidak lapor dan terlambat melakukan pelaporan/pembayaran masa.
- ✓ Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan (data matching).
- ✓ Menerbitkan Surat Teguran atas SPT Tahunan/Masa
- ✓ Penelitian Penurunan Pembayaran PPH Pasal 21/PPN/PPH Pasal 25
- ✓ Menindaklanjuti Data IMB
- ✓ Melakukan sosialisasi kepada instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lain (ILAP)
- ✓ Optimalisasi dan peningkatan kegiatan pengawasan kepada Wajib Pajak terkait pemungutan/pemotongan pajak

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan Kinerja	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	120%

**4. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
✓ Mengingatkan Wajib Pajak melalui WA/SMS Blast untuk melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Masa secara tepat waktu.	

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Melakukan Penelitian dalam rangka pencabutan PKP secara jabatan sesuai ND Pelayanan</li> <li>✓ Menerbitkan STP atas Wajib Pajak yang tidak lapor dan terlambat melakukan pelaporan/pembayaran masa.</li> <li>✓ Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan (data matching).</li> <li>✓ Menerbitkan Surat Teguran atas SPT Tahunan/Masa</li> <li>✓ Penelitian Penurunan Pembayaran PPH Pasal 21/PPN/PPH Pasal 25</li> <li>✓ Menindaklanjuti Data IMB</li> <li>✓ Melakukan sosialisasi kepada instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lain (ILAP)</li> <li>✓ Optimalisasi dan peningkatan kegiatan pengawasan kepada Wajib Pajak terkait pemungutan/pemotongan pajak</li> </ul>	2025
---	------

IKU ini sudah berwarna hijau , dari target capaian Sampai dengan Triwulan IV 2024 sebesar 100% terealisasi 120% dengan indeks capaian sebesar 120.

## 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Realisasi	100,5%	110,56%	110,56%	99%	99%	107,24%	107,24%
Capaian	100,46%	110,56%	110,56%	99,43%	99,43%	107,24%	107,24%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

**Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**  
= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- **Realisasi IKU**

IKU ini sudah berwarna hijau , dari target capaian Sampai dengan Triwulan IV 2024 sebesar 100% terealisasi 107,24 % dengan indeks capaian sebesar 107,24

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu					107,24%

**Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja**

- ✓ Pembentukan Komite Kepatuhan 2024
- ✓ Penyusunan strategi pengamanan penerimaan pajak dan pengawasan 2024
- ✓ Monitoring dan Evaluasi Kinerja Komite Kepatuhan KPP Triwulan IV Tahun 2024
- ✓ Pengusulan bahan baku pemeriksaan melalui DSPP kolaboratif

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	107,24%

**4. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pembentukan Komite Kepatuhan 2024</li> <li>✓ Penyusunan strategi pengamanan penerimaan pajak dan pengawasan 2024</li> <li>✓ Monitoring dan Evaluasi Kinerja Komite Kepatuhan KPP Triwulan IV Tahun 2024</li> <li>✓ Pengusulan bahan baku pemeriksaan melalui DSPP kolaboratif</li> </ul>	2025

**7a-cp Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	118,58%	118,58%	119,64%	119,64%	119,94%	119,94%
Capaian	120,00%	118,58%	118,58%	118,58%	118,58%	118,58%	118,58%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- **Formula IKU**

$$\frac{(\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) + (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%)}{100}$$

*Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%*

- **Realisasi IKU**

Dari target trajectory sampai dengan Triwulan IV 2024 sebesar 100% IKU ini sudah terealisasi 119,94 %. Dengan indeks capaian mencapai 119,94

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	138,21%	99,42%	105,19%	107,93%	119,94%

### Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja

- ✓ Penambahan usulan pemeriksaan dari RTLB dan post audit pengembalian pendahuluan
- ✓ melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak untuk membayar SKPKB

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjan Kinerja	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	119,94%

**4. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penambahan usulan pemeriksaan dari RTLB dan post audit pengembalian pendahuluan</li> <li>✓ melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak untuk membayar SKPKB</li> <li>✓ Membuat link daftar tunggakan yang bisa diakses oleh seluruh FPP</li> </ul>	2025

**07b-cp Tingkat efektivitas Penagihan**

Dari target trajectory Triwulan IV 2024 sebesar 30% sudah terealisasi 39,80% dengan indeks capaian sebesar 100,12.

Berikut perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15,00%	30%	30%	45,00%	45%	75,00%	75,00%
Realisasi	15,02%	39,80%	39,80%	73,88%	73,88%	85,36%	85,36%
Capaian	100,13%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	113,81%	113,81%

IKU ini terdiri dari 3 komponen variable penghitungan yaitu :

- a. Variabel tindakan penagihan,
- b. Variabel tindak lanjut DSP
- c. Variabel pencairan DSPC

Untuk mencapai target IKU ini sudah dilakukan beberapa aksi yaitu :

1. JSPN ketika kelapangan selalu di dampingi oleh pelaksana dan kepala seksi P3
15. Koordinasi dengan Kanwil untuk Tracking Penanggung Pajak
16. Mengumpulkan informasi tentang profil penanggung pajak dari AR maupun fungsional, untuk memudahkan proses penagihan pajaknya

- ❖ 07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Dari target capaian Triwulan IV 2024 sebesar 100% belum ada realisasi, Adapun target tahun 2024 adalah 1 usulan pemeriksaan bukti permulaan yang disetujui oleh Kanwil untuk ditindaklanjuti pemeriksaan. Untuk tahun berikutnya akan dilakukan usulan di awal tahun dan akan dilakukan mitigasi atas tidak tercapainya IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Berikut perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20,00%	50%	50%	75,00%	75%	100,00%	100,00%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Untuk mencapai target IKU ini sudah dilakukan beberapa kegiatan yaitu :

1. Permintaan bantuan pembuatan KKA pada AR dan FPP
2. Menganalisis dan membuat Daftar Harta Wajib Pajak
3. JSPN ketika kelapangan selalu di dampingi oleh pelaksana dan kepala seksi P3
4. Penambahan usulan pemeriksaan dari RTLB dan post audit pengembalian pendahuluan
5. melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak untuk membayar SKPKB

## 8. Data dan informasi yang berkualitas

Sasaran strategis ini memiliki 2 IKU yaitu :

- ❖ 08a-cp Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Dari target trajectory Triwulan IV 2024 sebesar 100% tercapai sebesar 120% dengan indeks capaian 120, IKU ini terdiri dari 2 komponen variable penghitungan yaitu dari kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dengan porsi masing-masing sebesar 50%.

Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang akurat melalui KPDL sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak, untuk periode berikutnya sampai dengan akhir tahun diupayakan bisa mencapai target dengan kualitas data yang valid.

Berikut perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80%	100,00%	100,00%
Realisasi	N/A	91,70%	91,70%	114,47%	114,47%	120,0%	120,0%
Capaian	N/A	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Untuk menunjang tercapainya IKU ini sudah dilakukan beberapa program kegiatan yaitu : Monitoring data Alket KPDL secara rutin dan dilakukan Bimtek Pengamatan

- ❖ 8b-cp Persentase penghimpunan data regional dari ILAP  
Sampai dengan Triwulan IV 2024 IKU ini terealisasi 85,36% dari target 75% dengan indeks capaian 120.

Berikut perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	0%	78%	78%	84%	84%	84%	84%
Capaian	0%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Untuk mencapai IKU ini KPP Pratama Karawang sudah melakukan upaya sinergi, koordinasi yang baik dan intens dengan pihak Pemda sehingga dari jumlah Data yang diminta bisa segera mendapatkan feedback yang positif di Triwulan IV 2024 dengan mengumpulkan sejumlah data yang diminta.

## 9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Sasaran strategis ini memiliki 3 IKU yaitu :

- ❖ 09a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM  
Perhitungan IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM IKU ini mengalami perubahan dibandingkan tahun 2023, untuk tahun ini penghitungan IKU ini terdiri dari 3  
Sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 aspek yaitu :
  - Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural,
  - Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional,
  - Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai

berdasarkan data yang tersedia realisasi IKU ini Sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar 117,41 dari target sebesar 100,

Berikut perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	97,01	108,33	108,33	110,58	110,58	117,41	117,41
Capaian	97,01%	108,33%	108,33%	110,58%	110,58%	117,41%	117,41%

Beberapa program kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi standar kompetensi :

- 1) Mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural bagi para Pejabat Eselon IV, Fungsional, Pelaksana, AR di lingkungan KPP Pratama Karawang
  - 2) Memberikan kesempatan kepada pegawai yang akan mengikuti Assesment dan/atau Uji Kompetensi, untuk melakukan persiapan dengan adanya bimbingan belajar Bersama
  - 3) Memberikan pendampingan upgrade kompetensi bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi
- ❖ 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit  
Dari hasil penilaian integritas melalui survey yang sudah ditetapkan melalui Nota Dinas kantor pusat adalah sebesar 93,99 dari target 85, sehingga indeks capaian tahun 2024 adalah 109,88

Berikut perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 :

❖ 9c-N Indeks efektivitas

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85,00	85,00
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	93,39	93,39
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	109,87%	109,87%

implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Dari target trajectory sampai dengan Triwulan IV 2024 sebesar 90 sudah terealisasi 97,26 Dengan indeks capaian mencapai 108,07, IKU ini terdiri dari 2 komponen variable penghitungan yaitu dari Pelaksanaan Program Budaya Kinerja dan Implementasi Manajemen Risiko

Berikut perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23,00	47,00	47,00	70,00	70,00	90,00	90,00
Realisasi	27,94	58,24	58,24	72,82	72,82	97,26	97,26
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	104,03%	104,03%	108,07%	108,07%

## 10. Pengelolaan keuangan yang Akuntabel

Sasaran strategis ini memiliki 1 IKU yaitu :

❖ 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

IKU ini bertujuan untuk Mengukur Mengukur Kualitas Pelaksanaan Anggaran sesuai ketentuan IKPA dan SMART. Setelah dilakukan perhitungan dengan berbagai elemen diatas maka realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Karawang pada Triwulan IV 2024 adalah sebesar 120 dari target 100 dengan indeks capaian sebesar 120

Berikut perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

### B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Tahun 2024 KPP Pratama Karawang memiliki Realisasi anggaran sebesar Rp 7.342.439.799 dengan persentase pelaksanaan anggaran sebesar 99.07%, realisasi tersebut atas Pagu anggaran sebesar Rp 7.411.075.000 dengan rincian nilai sebagai berikut :

3. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp 936.897.650 atau sebesar 96,07% dari pagu sebesar Rp 975.235.000;
4. Realisasi belanja barang sebesar Rp 6.145.300.429 atau sebesar 99,52% dari pagu sebesar Rp 6.174.646.000;
5. Realisasi belanja modal sebesar Rp 260.241.720 atau sebesar 99,64% dari pagu sebesar Rp 261.194.000;
6. Capaian Keluaran Rill KPP Pratama Karawang tahun 2024 adalah sebesar 99,07% dengan jumlah Rp 7.342.439.799.

Nilai kinerja SMART-DJA 2024 KPP Pratama Karawang adalah sebesar 100% dan nilai IKPA 2024 adalah 99,89%. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah 120%.

### **C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam pencapaian IKU yang sudah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024, KPP Pratama Karawang sudah melakukan upaya yang optimal dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada baik sumber daya manusia dan anggaran. dari pagu anggaran tahun 2024 sudah dilakukan efisiensi anggaran dengan capaian IKU kualitas pelaksanaan anggaran 120% , dan setiap pegawai sudah menjalankan tugas-tugas sesuai dengan job description masing-masing , sinergi dari semua pegawai untuk mencapai hasil Nilai Kinerja Organisasi yang maksimal

### **D. Kinerja Lain-Lain**

Selama tahun 2024 KPP Pratama Karawang mendapatkan berbagai penghargaan di tingkat wilayah yaitu :

1. Unit Kerja dengan Capaian Jamlat Pegawai Peringkat Kedua Semester I Tahun 2024 di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II
2. Unit Kerja dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Peringkat Kedua Tahun 2023 di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II
3. Capaian IKPA Terbaik Tingkat Satker Kantor Wilayah DJP Tahun 2023
4. Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan SUKI Terbaik di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Tahun 2023
5. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data Terbaik III di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II
6. Kepala Seksi Pengawasan Kewilayahan Terbaik III di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II
7. Penggunaan Cash Management System Peringkat 3 Periode Semester I Tahun 2024
8. Kantor Pelayanan Terbaik Peringkat 3 di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Tahun 2024

Diharapkan prestasi yang sudah diraih selama 2024 dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi di tahun berikutnya.

### **E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**

Pada tahun 2024 dari hasil pengujian kepatuhan atas proses bisnis pengawasan wajib pajak oleh Account Representative

## F. BAB IV PENUTUP

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu menghimpun penerimaan negara, KPP Pratama Karawang sudah baik namun ada beberapa sasaran strategis dan capaian indeks kinerja utama (IKU) yang masih perlu ditingkatkan agar bisa mencapai target yang sudah direncanakan di awal taun yaitu dengan cara :

1. Perencanaan dan monitoring evaluasi yang lebih intens dan efektif ;
2. Pembuatan inisiatif strategi yang meliputi, Pengawasan, Ekstensifikasi, Pemeriksaan dan Penagihan; dan
3. Dalam Pelaksanaan inisiatif strategi perlu adanya bimbingan serta pengawasan.
4. Melakukan mitigasi dan strategi yang lebih komprehensif dan intensif dalam mencapai target IKU yang capainnya masih rendah.

Karawang, 30 Januari 2024  
Plt Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Karawang



Ditandatangani secara elektronik  
Sutan Andi Gunawan Srg

### Lampiran-Lampiran

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja 2024
2. Nilai Kinerja Organisasi 2024



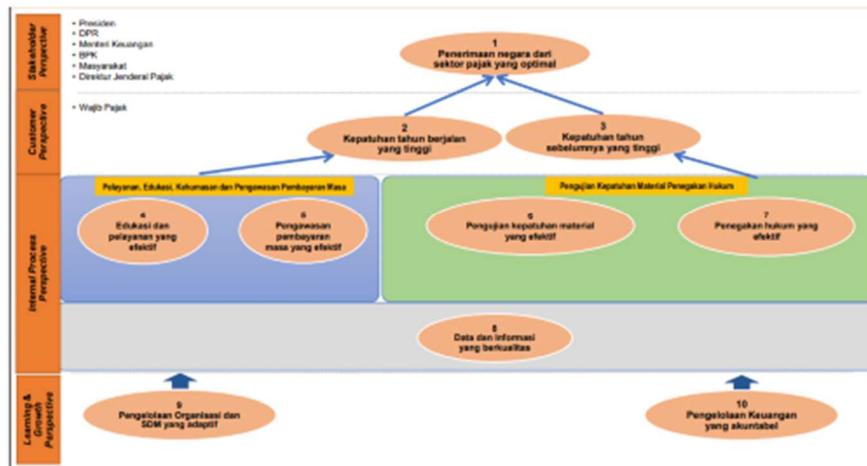
# PERJANJIAN KINERJA KPP PRATAMA KARAWANG TAHUN 2024



## PERJANJIAN KINERJA NOMOR PK-17/WPJ.22/2024 KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARAWANG KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT II DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024

### Peta Strategi

Visi :  
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARAWANG**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT II**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

**Program/ Kegiatan Tahun 2024**

**Anggaran**

A. <i>Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp	1.254.914.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	523.575.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	210.614.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	520.725.000
B. <i>Program Dukungan Manajemen</i>	Rp	5.455.360.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	4.394.275.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	1.061.085.000

Karawang, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II,      Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Harry Gumelar



Ditandatangani Secara Elektronik  
Udianto

# NILAI KINERJA ORGANISASI KPP PRATAMA KARAWANG TAHUN 2024

NILAI KINERJA ORGANISASI KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II KPP Pratama Karawang PERIODE PELAPORAN: S.D TRIWULAN IV 2024 (sumber data : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor ) Target IKU sampai dengan Akhir Tahun								
Kode SS/IT	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<b>Stakeholder Perspective</b>							30,00%	102,79
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,79
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,05%	Max	E/L	26%	57,78%	100,05
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	106,55	Max	P/L	19%	42,22%	106,55
<b>Customer Perspective</b>							20,00%	100,26
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							100,51
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,05%	Max	E/L	26%	57,78%	100,05
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	101,1%	Max	P/L	19%	42,22%	101,13
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		101,13%					100,01
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,01%	Max	E/M	21%	100,00%	100,01
<b>Internal Process Perspective</b>							25,00%	108,62
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,60
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107,19%	Max	E/M	21%	50,00%	107,19
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	108,88%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							115,64
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	119,67%	Max	P/M	14%	33,33%	119,67
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	107,24%	Max	P/M	14%	33,33%	107,24
7	Penegakan hukum yang efektif							73,88
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,94%	Max	P/M	14%	26,92%	119,94
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	85,36%	Max	P/L	19%	36,54%	113,81
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	0,00%	Max	P/L	19%	36,54%	0,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,0%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	84,00%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>							25,00%	115,89
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,78
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,41	Max	P/M	14%	33,33%	117,41
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,39	Max	P/M	14%	33,33%	109,87
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	97,26	Max	P/M	14%	33,33%	108,07
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>								107,02